

KEBIJAKAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA NATIONAL DEFENSE AWARENESS BUILDING POLICY

Dinda Maharani¹, Safira Rusyda², Fitria Novarina³,

Claudia Dwi Anugrah Purba⁴, Tifani Agustin⁵, Imam Ghozali⁶

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: 23081010132@student.upnjatim.ac.id¹, 23081010038@student.upnjatim.ac.id²,
23081010121@student.upnjatim.ac.id³, 23081010312@student.upnjatim.ac.id⁴,
23020410114@student.upnjatim.ac.id⁵, imamghozali.tl@upnjatim.ac.id⁶

ABSTRAK

Bela negara merupakan kewajiban konstitusional yang tertuang dalam berbagai kerangka hukum di Indonesia. Penanaman kesadaran bela negara bertujuan untuk memperkuat pertahanan nasional dan melibatkan seluruh warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk membahas kebijakan pembinaan kesadaran bela negara, implementasinya, serta tantangan yang dihadapi. Melalui studi deskriptif kualitatif, penulis mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini, yaitu kurangnya pemahaman sejarah, adanya segregasi rasial, dan lemahnya penghayatan nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran, dialog antar budaya, serta penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila di berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Kebijakan bela negara harus diintegrasikan dengan pendekatan pendidikan yang komprehensif, yang tidak hanya fokus pada aspek pertahanan fisik, tetapi juga pada pembangunan karakter dan kesadaran hukum sebagai warga negara.

Kata Kunci: bela negara, kesadaran nasional, pendidikan kewarganegaraan, pancasila

ABSTRACT

Defending the country is a constitutional obligation contained in various legal frameworks in Indonesia. Instilling awareness of national defense aims to strengthen national defense and involve all citizens in maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This article aims to discuss policies for fostering awareness of national defense, their implementation, and the challenges faced. Through a qualitative descriptive study, the author identified three main challenges in implementing this policy, namely a lack of understanding of history, the existence of racial segregation, and a weak appreciation of Pancasila values. To overcome these challenges, innovation is needed in learning methods, intercultural dialogue, and strengthening the internalization of Pancasila values in various levels of society, especially the younger generation. National defense policies must be integrated with a comprehensive educational approach, which does not only focus on aspects of physical defense, but also on building character and legal awareness as citizens.

Keywords: *defending the country, national awareness, citizenship education, Pancasila*

PENDAHULUAN

Bela negara adalah kewajiban konstitusional setiap orang, yang diabadikan dalam berbagai kerangka hukum negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menguraikan kewajiban bela negara yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Penyelenggaraan pendidikan bela negara yang dilakukan untuk menciptakan kader-kader bela negara merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keterlibatan warga negara dalam sistem pertahanan negara (Fanani et al., 2022). Pendidikan bela negara dilaksanakan sebagai bentuk implementasi pembinaan kesadaran bela negara untuk dapat mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Pembinaan kesadaran bela negara atau yang lebih dikenal dengan istilah PKBN merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan daya tangkal untuk memperkuat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala peluang dan ancaman dari dalam dan luar negeri. Namun demikian, terdapat banyak tantangan dalam implementasi kebijakan pembinaan kesadaran bela negara. Pendekatan yang holistik dan inklusif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif diperlukan karena pemahaman dan interpretasi yang berbeda mengenai makna bela negara dapat menimbulkan perselisihan di kalangan masyarakat, dan keterjangkauan serta akses terhadap program pendidikan bela negara dapat menjadi hambatan yang signifikan.

Tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bela negara tidak hanya mencakup topik-topik yang berhubungan dengan militer atau pertahanan, tetapi juga elemen-elemen pendidikan dan pembangunan karakter. Untuk menanamkan cita-cita nasional dan keterampilan yang diperlukan untuk melestarikan integritas bangsa, program pendidikan yang komprehensif harus dibuat. Masyarakat dapat belajar lebih banyak tentang tanggung jawab dan hak-hak mereka sebagai warga negara, serta bagaimana mereka dapat mendukung keamanan nasional, melalui pendidikan yang terorganisir dan tahan lama.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat 3 indentifikasi masalah utama yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pembinaan kesadaran bela negara?
2. Bagaimana implementasi kebijakan kesadaran bela negara?
3. Bagaimana tantangan dalam implementasi kebijakan kesadaran bela negara?

METODELOGI PELAKSANAAN

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif dalam penulisan artikel ini, karena dianggap efektif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik yang dibahas. Untuk memudahkan pemahaman pembaca, penulis menyusun kalimat-kalimat dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berbagai sumber literatur, seperti buku dan majalah dari sumber yang dapat dipercaya, digunakan sebagai referensi dalam penulisan artikel ini. Penelitian yang disajikan juga didasarkan pada kajian literatur yang relevan. Selain itu, penulis berupaya untuk menjaga objektivitas dan konsistensi dengan menghindari pandangan subjektif dan memastikan bahwa data yang digunakan tepat dan sesuai. Setiap argumen disusun berdasarkan bukti yang kuat, dengan penataan informasi yang logis dan terstruktur, sehingga diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan berguna bagi pembaca dalam memperluas wawasan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Kemajuan teknologi dan globalisasi membuka akses bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal budaya asing dan dunia luar. Namun pengaruh ini sering diserap secara berlebihan, terutama oleh generasi muda, hingga menyebabkan lunturnya rasa bangga terhadap identitas bangsa sendiri. Banyak anak muda mulai kehilangan semangat nasionalisme dan jati diri

mereka, yang pada akhirnya bisa memicu masalah serius seperti konflik sosial, perpecahan, dan krisis karakter bangsa.

Masyarakat Indonesia perlu menanamkan dan menghargai nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, demokrasi, serta kesadaran hukum, untuk membangun semangat kebangsaan dan memanfaatkan kemerdekaan secara optimal. Nilai-nilai ini harus dijaga dan diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat agar mampu menghadapi perubahan zaman dengan bijaksana. Dalam konteks ini, bela negara menjadi bagian penting dari tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk individu yang berkarakter, cerdas, serta memiliki semangat nasionalisme. Bela negara yang kuat juga berperan dalam menjaga keutuhan, keamanan, dan stabilitas bangsa, sekaligus menjadi fondasi yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Untuk menumbuhkan rasa bela negara, kebijakan pembinaan bela negara bisa menjadi langkah efektif, khususnya bagi generasi muda. Melalui pembinaan karakter yang berfokus pada bela negara, rasa nasionalisme dan cinta tanah air dapat semakin ditanamkan. Dukungan pemerintah memegang peran penting dalam mewujudkan hal ini, salah satunya dengan memperbarui Sistem Pendidikan Nasional agar materi bela negara dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran.

2.2 Implementasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara

Menurut (Sutarman, 2011), konsep bela negara terbagi menjadi dua kategori: fisik dan non-fisik. Bela negara fisik berfokus pada upaya menghadapi ancaman dari luar, sementara bela negara non-fisik ditujukan untuk mempertahankan kesatuan dan keutuhan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, bela negara non-fisik merujuk pada Undang-Undang No. 3 tahun 2002, yang menekankan pentingnya partisipasi warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan (Suryatni, 2019). Keterlibatan kita sebagai warga negara dalam bela negara non-fisik adalah hal yang sangat penting, bahkan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dan melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa unsur dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: Pertama, cinta tanah air; ini dapat diwujudkan dengan menjaga dan merawat bangsa dari berbagai ancaman. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara; hal ini dapat diungkapkan melalui bakti dan kontribusi positif bagi negara. Ketiga, keyakinan pada ideologi bangsa, yakni mengamalkan Pancasila dalam setiap aspeknya, serta memahami fungsinya sebagai pemersatu di tengah perbedaan. Keempat, sikap rela berkorban untuk bangsa, yang berarti lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Kelima, memiliki kemampuan awal dalam bela negara.

Namun, hingga saat ini, pemahaman tentang bela negara seringkali terbatas pada tindakan militer oleh TNI atau aspek keamanan yang diemban oleh Polri (Wulandari, 2020). Pelaksanaan kebijakan pembinaan kesadaran bela negara dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pendidikan formal, pelatihan, dan kampanye kesadaran di masyarakat. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi inovatif dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sekolah dasar, dengan mengajarkan tentang bangsa dan negara Indonesia. Ini memiliki makna filosofis sebagai landasan kekuatan yang mengikat dalam membentuk mentalitas pluralisme multikultural untuk mencapai tujuan nasional dan modernisasi tanpa melupakan kearifan lokal (Wibowo & M, 2017). Jika elemen-elemen tersebut diterapkan dengan tepat kepada siswa, maka nilai bela negara yang dimiliki oleh mereka akan menjadi semakin kuat. Pelatihan bela negara juga dilaksanakan melalui program latihan fisik dan mental yang diorganisir oleh lembaga seperti TNI dan Polri. Program ini melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya kalangan pemuda dan profesional, untuk mempersiapkan mereka menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam pelatihan ini, masyarakat diajarkan keterampilan dasar pertahanan serta diingatkan untuk aktif berkontribusi dalam menjaga keamanan negara.

Selain itu, kampanye kesadaran bela negara juga dilakukan melalui media massa dan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pendekatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya peran serta dalam menjaga keutuhan NKRI. Masyarakat juga dapat memanfaatkan media sosial secara bijak, tidak hanya untuk menyebarkan informasi positif dan menghindari hoax, tetapi juga untuk memberikan edukasi. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pemahaman tentang ketahanan negara dengan cara yang sederhana dan tidak terjebak dalam tren yang sedang berlangsung.

2.3 Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara

Implementasi kebijakan kesadaran bela negara tidak luput dari berbagai tantangan dan masalah yang menyertai dalam setiap pelaksanaannya. Hal ini mencakup ke dalam kesiapan warga negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dalam berkontribusi dalam menjaga kemerdekaan, kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Rasa nasionalisme dan juga patriotisme merupakan suatu dasar penting menjadi akar dalam setiap sikap dan perilaku bela negara. Oleh karena itu, stabilitas Negara kesatuan republik Indonesia bergantung ke dalam penguatan dasar dan nilai-nilai bela negara. (Murti et al., 2020).

Pudarnya identitas bangsa akan memiliki dampak yang besar dalam situasi dan kondisi yang akan membawa Indonesia dalam kondisi krisis (Murti et al., 2020). Kondisi ini akan menjadi ancaman yang dapat merusak tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam generasi muda. Terdapat 3 faktor tantangan utama dalam implementasi kebijakan kesadaran bela negara, diantaranya yaitu :

1. Kurangnya pemahaman sejarah.

Kurangnya pemahaman sejarah merupakan salah satu tantangan utama yang perlu dihadapi terutama oleh generasi muda. Saat ini banyak dari kalangan generasi muda yang hanya memiliki sedikit pengetahuan terhadap sejarah nasionalisme bangsanya sendiri, hal ini menyebabkan kurangnya tingkat apresiasi bangsa terhadap pentingnya nilai-nilai bela negara. Menurut (Suryadi., 2020) pendidikan sejarah yang menjadi dasar pengetahuan siswa sering kali terbatas dalam hafalan tanggal, peristiwa maupun tokoh. Hal ini menyebabkan kurangnya minat siswa dalam memahami esensi perjuangan bangsa dan

menjadikan pendidikan sejarah di Indonesia menjadi kurang komprehensif di sekolah sekolah. tidak hanya itu, keterbatasan akses kepada sumber daya yang berkualitas juga menjadi hambatan dalam mendalami nilai sejarah.

Berdasarkan permasalahan tersebut untuk mengatasi masalah diperlukan inovasi dalam metode pengajaran sejarah, seperti penggunaan media digital, visualisasi yang menarik, serta narasi yang menyentuh emosi dan relevan dengan isu-isu masa kini.

2. Segregasi Rasial

Segregasi rasial merupakan perpecahan antara 2 atau lebih etnis atau agama. permasalahan dari segregasi rasial ini masih menjadi konflik yang paling sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. hal ini disebabkan oleh berbagai perbedaan sosial budaya yang telah mengakar kuat di masyarakat. permasalahan ini tidak hanya menghambat integrasi sosial, tetapi juga mempersulit penanaman nilai dan pembinaan bela negara yang inklusif dan merata. Menurut Penelitian (Wijaya., 2019) menunjukkan bahwa segregasi ini sering kali disebabkan oleh perbedaan etnis dan agama yang masih kuat di beberapa komunitas .

Untuk mengatasi segregasi rasial, diperlukan adanya kesadaran dari maupun pemerintah dalam mengembangkan program-program yang mendorong dialog antar budaya dan kerja sama lintas komunitas, sehingga kesadaran bela negara dapat dipupuk dalam suasana yang inklusif dan harmonis.

3. Pemahaman Dasar Nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi dasar utama dari program bela negara, namun dalam praktiknya, banyak program yang tidak sepenuhnya mengintegrasikan atau memfokuskan pada pengajaran nilai-nilai Pancasila. Menurut (Hidayat., 2021), beberapa masalah terkait hal ini adalah Pemahaman Pancasila seringkali bersifat formal tanpa penghayatan mendalam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan program bela negara cenderung dogmatis, kurang memberikan ruang diskusi praktis. Selain itu, minimnya internalisasi nilai Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat menciptakan kesenjangan antara teori dan praktik.

Pemahaman Pancasila seringkali bersifat formal tanpa penghayatan mendalam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan program bela negara cenderung dogmatis, kurang memberikan ruang diskusi praktis. Selain itu, minimnya internalisasi nilai Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat menciptakan kesenjangan antara teori dan praktik.

SIMPULAN

Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Penanaman nilai-nilai nasionalisme,

cinta tanah air, serta penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara perlu diterapkan melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye kesadaran yang melibatkan semua elemen masyarakat, terutama generasi muda. Namun, terdapat tantangan signifikan seperti kurangnya pemahaman sejarah, segregasi rasial, dan lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasinya, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran, dialog antar budaya, dan penghayatan yang lebih mendalam terhadap Pancasila agar kesadaran bela negara dapat terwujud secara komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyati, Auli Ihza, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Bela Negara di Era Teknologi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan." *Journal on Education*, 2021.

Fanani, et al. "Implementasi Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Pada Mahasiswa Bidikmisi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 6, 2022, p. 1.

Hidayat, Ujang Syarip. *Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045: Strategi Membangun Generasi Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing di Abad 21*. 1 ed., vol. 1, Sukabumi, Nusa Putra Press, 2021.

Murti, Hari, et al. "Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Mendukung Pertahanan Negara." *Jurnal Strategi Perang Semester*, vol. 6, 2020, p. 5.

Rio Hadi Kusumah, Adnasohn Aqilla Respati, Akbar Haditama Supriyatno. *Peran Kesadaran Bela Negara Dalam Pengembangan Karakter Kepemimpinan Generasi Muda*, Juni 2022.

Suryadi, Ahmad. *Teknologi dan Media Pembelajaran Jilid I*. 1 ed., vol. 1, Sukabumi, CV Jejak (Jejak Publisher), 2020.

Suryatni, L. "Bela Negara Sebagai Pengejawantahan dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. Vol. 1, 2019.

Sutarman. "Persepsi dan pengertian pembelaan negara berdasarkan UUD 1945 (amandemen)." *Magistra*, 2011.

Wahyudi, S. T., Hadi, S., & Widoretno. "Ikraith-Humaniora Vol. 8, No. 1." *Konsep Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Menangkal Radikalisme Di Indonesia (Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara)*, 2024.

Wibowo, A. P., and M. Wahono. "Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret memperkuat multikulturalisme di Indonesia." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2017.

Wijaya, David. *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. 1 ed., vol. 1, Jakarta, prenadamedia group 1, 2019.

Wulandari, A. "Menghadirkan Perempuan dalam Historiografi Pasca Merdeka: Membangun Karakter Bela Negara Melalui Narasi Sejarah." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 2020.